



## ***Ijtihad Siyasi* dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik sebagai Akar Komunikasi Politik Persatuan Islam**

**Hamzah Turmudi<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

\* email. [hamzah.turmudi@uinsgd.ac.id](mailto:hamzah.turmudi@uinsgd.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Islamic unity (Persis) is seen as having its political communication patterns and models that cannot be separated from the doctrine of understanding Islamic teachings. Islamic unity has the characteristics and mechanisms of aspiration and political participation as an effort to internalize fiqhiiyah puritanism. This study aims to explore the roots of political communication in Persis organizations from the perspective of symbolic interactionism. The study was conducted using a qualitative approach through the study of phenomenology, used to explore the tradition of the roots of political communication involving twelve members of the Bandung Islamic Association as the primary informant. The results showed that ijtihad siyasi was seen as the root of the political communication of Islamic Unity. Siyasi ijtihad includes three main political communication strategies, namely idaratu da'wah as the Persis worshippers' framework, id quote as the self-concept of Persis political communication and idaratu ummah as a Persis political communication society framework. Ijtihad siyasi is interpreted as a fiqhiiyah reference in the context of building the concept of Persis da'wah in the national field.*

**Keywords:** *Ijtihad Siyasi, Political Communication, Persatuan Islam, symbolic interactionism*

### **ABSTRAK**

Persatuan Islam dipandang memiliki pola dan model komunikasi politik tersendiri yang tidak bisa dilepaskan dari doktrin pemahaman ajaran Islam. Persatuan Islam memiliki karakteristik dan mekanisme aspirasi dan partisipasi politik sebagai upaya internalisasi puritanisme fiqhiiyah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali akar komunikasi politik pada organisasi Persis dalam perspektif interaksionisme simbolik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi fenomenologi yang digunakan untuk menggali tradisi akar komunikasi politik yang melibatkan dua belas jamaah Persatuan Islam Kota Bandung sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ijtihad siyasi dipandang sebagai akar komunikasi politik Persatuan Islam. Ijtihad siyasi meliputi tiga strategi komunikasi politik utama, yakni *idaratu da'wah* sebagai kerangka pikir jamaah Persis, *idaratu qunwaw* sebagai konsep diri komunikasi politik Persis dan *idaratu ummah* sebagai kerangka *society* komunikasi politik Persis. Ijtihad siyasi dimaknai sebagai rujukan fiqhiiyah dalam kerangka membangun konsep dakwah Persis dalam medan kebangsaan.

**Kata kunci :** ijtihad siyasi, komunikasi politik, Persatuan Islam, interaksionisme simbolik

## PENDAHULUAN

Kemunculan partai-partai politik setelah runtuhnya Orde Baru menimbulkan masalah baru. Jumlah partai politik yang banyak, yakni 48 partai pada pemilu tahun 1999, pada pemilu 2009 sebanyak 38 partai politik, 24 partai politik pada Pemilu 2004, dan 46 partai politik pada Pemilu 2009; menimbulkan persepsi bahwa masyarakat pemilih pada saat itu lebih mengedepankan sisi emosional dan primordial. Baik masyarakat pemilih secara individu maupun kelompok masyarakat pemilih yang tergabung dalam ormas-ormas keagamaan. Misalnya: Jamaah Nahdhatul Ulama sebagian besar menyalurkan aspirasi politiknya ke PKB, PNU, PPP atau PKU. Sedangkan jamaah Muhammadiyah memilih PAN. Begitu juga dengan jamaah Persatuan Islam menyalurkan aspirasi politiknya ke PBB atau PKS.

Persatuan Islam merupakan salah satu bagian penting dari elemen bangsa yang semasa Orde Baru mengikrarkan diri sebagai organisasi independen, tidak berpihak terhadap partai politik bentukan pemerintah pada waktu itu baik secara individu maupun secara legal formal organisasi (Badri, 2002:67). Persatuan Islam merasa kecewa dengan regulasi politik yang diterapkan oleh rezim Orde Baru, maka Persatuan Islam memilih untuk berdiam diri dan memposisikan sebagai organisasi keagamaan yang mengurus masalah agama dan pembinaan kader-kader jamaah Persatuan Islam *an sich*; terutama yang berkaitan dengan pendidikan pesantren dan *tabligh*. Padahal rezim Orde Baru menyediakan wadah partai yang berlatar belakang agama, hal ini diperuntukkan untuk menampung aspirasi politik masyarakat Islam melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Muchtar, 1980: 12).

Setelah sekian lama “mengasingkan diri” dari kancah politik praktis, Persatuan Islam mulai memberikan respon ketika rezim Orde Baru runtuh digantikan dengan Orde Reformasi. Sejak lahirnya reformasi tahun 1998, kepekaan politik Persatuan Islam mulai terbangun. Hal ini sejalan dengan era demokratisasi dan keterbukaan (Mufti, 2000: 9). Terbukanya kran kebebasan, Persatuan Islam mendapatkan angin segar untuk mengekspresikan aspirasi politiknya yang selama Orde Baru dipasung dan tersumbat oleh budaya politik tertutup dan otoriter. Aspirasi politik tersebut disalurkan melalui partai politik yang cikal bakalnya adalah dari kader-kader Persatuan Islam, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) (Sofyan, 2002: 16). Dengan demikian sejak runtuhnya Orde Baru jamaah Persatuan Islam bukan hanya sebagai *ustadz*, namun juga ia sebagai politisi.

Keberpihakan dan dukungan Persatuan Islam kepada PBB tersebut secara aklamasi dilakukan dari mulai pucuk pimpinan tertinggi sampai tingkat anggota. Salah satu indikasi tersebut nampak pada perolehan suara Partai Bulan Bintang yang signifikan di kantong-kantong Persatuan Islam pada Pemilu 1999 sehingga

masuk kedalam partai yang meraih *electoral treshbold*, yaitu partai yang memiliki hak untuk mengajukan calon presiden sendiri dan mengikuti pemilu berikutnya (Pemilu 2004).

Seiring dengan perjalanan waktu, ada kecenderungan bahwa jamaah Persatuan Islam merasa kecewa atas perilaku para elite politik Partai Bulan Bintang (PBB) khususnya para wakil rakyat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai tersebut yang menyimpang dari amanah reformasi. Hal itu tercermin dengan turunnya perolehan suara PBB pada Pemilu 2004. Partai ini justru kalah oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dianggap partai baru meskipun sebenarnya sudah berdiri dengan nama Partai Keadilan, namun kalah dan tidak lolos *electoral tresh bold* pada Pemilu 1999. Diduga kuat turunnya suara PBB diakibatkan oleh beralihnya aspirasi politik jamaah Perstuan Islam ke PKS, khususnya pada level anggota.

Fenomena pada Pemilu 2004 tersebut ditengarai semakin nampak dalam Pemilihan Presiden 2009; Pada tingkat elite pimpinan Persatuan Islam, mulai pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah sampai pada pimpinan cabang, sudah mengisyaratkan dukungan terhadap pasangan calon Presiden dan wakil Presiden JK-Wiranto. Dukungan tersebut terbaca secara implisit dan eksplisit melalui statement-statement yang dilontarkan pada forum-forum tertentu kegiatan internal organisasi Persatuan Islam. Misalnya, pada kesempatan pengajian rutin, pembekalan kader, maupun obrolan-obrolan informal lainnya. Namun statement-statement dukungan tersebut ternyata tidak ditetapkan sebagai sebuah keputusan resmi organisasi Persatuan Islam.

Pada level pimpinan harian dukungan itu sudah cukup untuk dijadikan acuan kemana aspirasi politik yang mesti disalurkan pada pemilihan Presiden 2009. Tetapi pada level anggota, muncul dugaan bahwa aspirasi politik jamaah Persatuan Islam disalurkan pada pasangan SBY-Budiyono. Terbukti dengan terpilihnya pasangan SBY-Budiyono di kantong-kantong jamaah Persatuan Islam seluruh Indonesia terutama Kota Bandung yang memiliki jumlah jamaah Persatuan Islam terbanyak di Indonesia. Hasil ini semakin mempertegas dugaan bahwa aspirasi politik pada level jamaah Persatuan Islam diberikan pada PKS yang notabene mendukung pasangan Capres dan Cawapres SBY-Budiyono.

Perubahan dan perbedaan dalam menyalurkan aspirasi politik jamaah Persatuan Islam pada moment pesta demokrasi di era reformasi ini menimbulkan pertanyaan, apakah alasan atau motif yang melatarbelakangi jamaah Perstuan Islam untuk melakukan hal tersebut; dimana jamaah Persatuan Islam dikenal sebagai organisasi yang solid, ta'at pada Imam dan Qonun, di samping selalu mengedepankan ijtihad siyasi yang melandasi aspirasi politik jamaah Persatuan Islam dalam menyalurkan pilihan politiknya. Perilaku jamaah Persatuan Islam mempunyai motif tertentu mengapa mereka melakukan hal tersebut. Motif sebagai penggerak yang menyebabkan mereka melakukan

sesuatu. Motif apa yang melatarbelakangi jamaah persatuan Islam. Alasan atau dorongan yang datang dari diri jamaah Persatuan Islam yang menyebabkan mereka berbuat sesuatu dalam proses komunikasi politik. Selain itu pula mereka mempunyai kebutuhan untuk mendefinisikan dirinya sendiri (konsep diri) yang kaitannya dengan orang lain di mana mereka terlibat di dalamnya. Itulah wujud dari jamaah Persatuan Islam dalam mengaktualisasikan diri sebagai da'i juga sebagai politikus.

Untuk menjelaskan fenomena tadi digunakan perspektif interaksi simbolik dalam konteks politik. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa "pembicaraan politik adalah aktivitas simbolik" (Nimmo, 2000: 66). Penelitian ini berusaha memahami komunikasi jamaah Persatuan Islam secara spesifik yang alamiah. Perilaku yang teramati dipahami berdasarkan perspektif orang yang diteliti, termasuk cara mereka menggunakan simbol dalam konteks yang spesifik. Peneliti berempati, dan sedapat mungkin mengalami apa yang disebut Weber (1968, dalam Bogdan & Taylor, 1993: 45) sebagai "verstehen", yakni "menyerap dan mengungkapkan lagi perasaan-perasaan, motif-motif, dan pemikiran-pemikiran yang ada di balik tindakan orang yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dalam perspektif komunikasi politik jamaah Persatuan Islam baik sebagai ustadz atau da'i maupun sebagai politisi, maka tidak semua simbol dianalisis. Analisis difokuskan kepada simbol-simbol yang relevan dengan hal tersebut di atas, atau *significant symbols*.

Menurut Mead (Nimmo, 2005: 67): Berpikir selalu melibatkan lambang. Lambang adalah signifikan (berarti) apabila ia mengakibatkan tanggapan yang sama pada orang lain. Lambang signifikan adalah lambang yang dapat menciptakan pengertian bersama bagi semua pihak dalam percakapan. Makna atau tanggapan pada suatu lambang tidak sama pada setiap orang. Lambang signifikan tidak ada sebelum percakapan, tetapi muncul melalui pengambilan peran bersama di dalam suatu proses interaksi sosial. Lambang signifikan yang menghasilkan perbendaharaan kata politik tumbuh dari negosiasi, konsolidasi dan pencitraan para komunikator politik secara berkesinambungan. Melalui penyusunan lambang signifikan pembicaraan politik menyajikan seluruh bidang diskusi bersama yang memelihara dan memperbesar peluang untuk melakukan pembicaraan yang ditujukan untuk menyesuaikan kepentingan yang berbeda-beda.

Perspektif interaksi simbolik dalam konteks politik (simbolisme politik) secara fundamental bertolak dari asumsi tentang dua dimensi manusia, yakni manusia sebagai pengguna simbol (*man-the-symbolist*) dan manusia sebagai insan politik (*man-the-political-being*). Keduanya bersifat konstan dan berinteraksi secara tak terpisahkan. Dalam konteks ini, politik didefinisikan sebagai aktivitas mendistribusikan, mempertahankan, dan melaksanakan kekuasaan di dalam suatu unit sosial. Kekuasaan sendiri, diekspresikan dalam berbagai relasi yang

ditandai oleh dominasi dan subordinasi, yang terjadi dalam semua aspek dalam hubungan sosial.

Sebagai aktivitas simbolik, aktivitas politik dimulai ketika orang menginterpretasikan tanda, isyarat, dan petunjuk dalam cara-cara yang bermakna. Melalui interpretasi citra mental tentang objek terbentuk para politisi, maupun kaum profesional bertukar citra atau makna melalui simbol. Sebagai representasi dan pikiran yang hidup (*living thought*), arti simbol-simbol yang dipertukarkan dalam proses komunikasi politik tidak bersifat transparan, melainkan akan sangat bergantung kepada makna yang dilekatkan orang terhadapnya. Dalam konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi, yang tidak terjadi dalam medium yang netral dari pengaruh organisasi dan kekuatan sosial" (Mulyana, 2001: 70).

Penelitian berkaitan dengan komunikasi politik dalam perspektif Islam dilakukan oleh Rasyid (2011) yang mengkaji konseptualisasi etika politik dalam perspektif komunikasi Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa institusionalisasi dan sosialisasi sistem etika secara praktis harus difungsikan sebagai sebuah pertimbangan dalam menentukan tindakan (benar/salah) pada situasi tertentu, termasuk dalam aspek politik. Penelitian Rosyidin (2015) yang meninjau Islam dan dinamika politik Indonesia dalam perspektif komunikasi politik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam dinamika politik Indonesia kontemporer sangat bergantung pada kredibilitas komunikator politik dari figur-figur politisi muslim. Minimnya figur-figur politik Islam yang memiliki kredibilitas tinggi di mata publik serta kurangnya kecakapan komunikasi menjadi penyebab bagaimana partai-partai Islam kurang maksimal dalam kontestasi politik di Indonesia.

Sedangkan Azhar (2017) meneliti mengenai politik pencitraan dalam perspektif komunikasi Islam. Azhar meneliti mengenai upaya-upaya partai Islam dalam menarik simpati masyarakat. Dalam pandangannya, komunikasi dalam perspektif Islam harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebaikan, kejujuran dan kebenaran. Dalam hal ini, setidaknya ada dua prinsip utama perspektif Islam dalam politik pencitraan, yakni, prinsip qaulan sadidan (berkata benar dan jujur) dan prinsip qaulan ma'rufan (berkata baik). Strategi pencitraan perlu juga dilakukan melalui media dengan cara membangun hubungan yang baik dengan media dan memanfaatkan media social secara tepat seperti halnya pemanfaatan E-mail, blog, media sosial ataupun Twitter (Mughtar & Aliyudin, 2019).

Penelitian lainnya dilakukan Abdullah (2017) yang menyorot momentum Aksi Bela Islam sebagai sebuah gerakan politik. Penelitiannya mencoba menganalisis Aksi Bela Islam sebagai sebuah gerakan politik identitas dan ijtihad politik alternatif umat Islam. Abdullah menganalisis dalam perspektif komunikasi politik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa momentum Aksi Bela Islam

yang melibatkan 7 juta umat Islam di Indonesia ditengarai sebagai sebuah gerakan politik identitas dan ijtihad politik untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan untuk semua warga Negara Indonesia. Penelitian [Nurussaadah \(2018\)](#) mengenai nilai keterbukaan ideologi partai Islam dalam perspektif komunikasi politik. Penelitian dilakukan terhadap Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ideologi keterbukaan DPW PKS Jawa Barat sebagai partai Islam dilakukan dengan tiga prinsip utama, yakni nilai ideologis, nilai sosiologis serta nilai politis.

Penelitian terbaru mengenai komunikasi politik Islam dilakukan oleh [Al mujib \(2020\)](#). Penelitian dilakukan untuk menganalisis komunikasi politik sosok Kyai. Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Annuriyyah Jember Jawa Timur dengan pendekatan studi etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik yang dilakukan kyai tidak lepas dari perspektif Islam. Komunikasi politik yang dilakukan kyai secara tatap muka tidak lepas dari pembejalaran kitab kuning yang ada di pondok pesantren. Hal ini membuktikan bahwa kehidupan kyai tidak lepas dari doktrin – doktrin agama Islam.

Sementara itu, riset seputar komunikasi politik Persatuan Islam pernah dilakukan oleh [Koswara & Gemiharto \(2017\)](#) dengan pendekatan dramaturgis. Penelitian dilakukan untuk menganalisis bagaimana strategi komunikasi politik diperankan oleh jamaah Persis dalam memunculkan eksistensi politiknya. Koswara dan Gemiharto melakukan analisis strategi komunikasi politik dalam aspek presentasi diri, panggung depan, panggung belakang, dan penggunaan tim dan interaksi sebagai ritual. Hasil penelitian menunjukkan manuper komunikasi politik yang dilakukannya jamaah persatuan islam telah menunjukkan eksistensinya sebagai politisi yang handal dalam kancah politik. Penelitian lainnya dilakukan [Nurhasanah \(2018\)](#) mengenai pesan komunikasi politik Persis dalam Pemilu 2014. Penelitian dilakukan dengan menganalisis pola dan model komunikasi politik persis yang dilakukan kepada anggota, bagian otonom dan simpatisan Persis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik persis pada pemilu 2014 dilakukan baik pada kalangan internal maupun eksternal. Adapun pola komunikasi di kalangan internal dilakukan dalam bentuk instruksi, sementara untuk kalangan eksternal (elite partai) dilakukan dalam bentuk himbauan dan maklumat yang bersifat simbolik dan persuasif.

Penelitian ini akan menggali konsep *Ijtihad siyasi* Persatuan Islam sebagai landasan komunikasi politik jamaah Persatuan Islam; dimana secara kelembagaan organisasi Persatuan Islam tidak terlibat secara langsung pada ranah politik praktis. Secara kelembagaan Persatuan Islam hanya memberikan rambu-rambu terhadap jamaahnya dalam melakukan langkah-langkah politik untuk kepentingan dakwah. Rambu-rambu tersebut dijadikan sebagai patokan serta acuan secara umum bagi jamaah Persatuan Islam. Jamaah Persatuan Islam yang di maksud dalam penelitian ini adalah anggota Persatuan Islam yang terlibat

dalam aktivitas politik dan dakwah, yang kemudian oleh peneliti dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini.

*Ijtihad siyasi* Persatuan Islam terdiri dari strategi komunikasi politik Persatuan Islam; yang menurut istilah informan penelitian ini adalah *idaratussiyasi*. *Idaratussiyasi* Persatuan Islam terdiri dari *idaratu da'wah*, *idaratu quwwah* dan *idaratu ummah*, kemudian urain dilanjutkan dengan refleksi paham keagamaan Persatuan Islam yakni *ijtihad*, *tajdid* dan *jihad*, dan terakhir kombinasi langkah-langkah strategi komunikasi politik Persatuan Islam, yakni *damju siyasi* Persatuan Islam. Hal tersebut di atas di jadikan acuan umum oleh jamaah Persatuan Islam dalam melakukan negoisasi, konsolidasi, serta pencitraan dalam komunikasi politik mereka. Organisasi, Lembaga atau perusahaan perlu memahami dan menyadari perlunya memberi perhatian yang cukup untuk membangun suatu citra yang menguntungkan (Mughtar, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

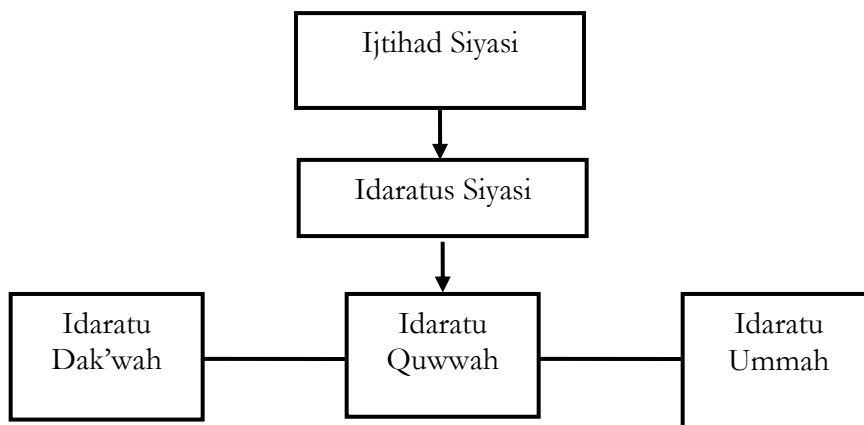
### ***Idaratu siyasi* sebagai Manifestasi Ijtihad Politik Persatuan Islam**

*Ijtihad siyasi* yang di jadikan acuan bagi jamaah Persatuan Islam adalah: *Idaratu siyasi* (strategi komunikasi politik), yang terdiri dari *idaratu da'wah*, *idaratu quwwah* dan *idaratu ummah*. Dari sinilah paham politik jamaah Persatuan Islam berpijak secara kuat sehingga memberikan warna terhadap negoisasi, konsolidasi serta pencitraan dalam komunikasi politik mereka.

Secara sederhana *ijtihad siyasi* Persatuan Islam dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 1

*Ijtihad siyasi* Persatuan Islam



Sumber: Observasi Penulis 2013



*Ijtihad* merupakan sebuah proses penelusuran secara sistematis yang dilakukan secara terus menerus mengenai berbagai persoalan dengan tanpa ada batasan sama sekali dari segala aspek dan waktunya. Bagi yang tidak mampu melakukannya harus *ber-ittiba'* yakni menerima atau mengikuti fatwa seseorang dengan syarat mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari fatwa tersebut (Jaenuri, 2002: 105).

Jamaah Persatuan Islam sering kali melakukan *ijtihad*. Mereka meyakini bahwa *ijtihad* sebagai salah satu cara untuk melaksanakan ibadah yang belum memiliki dasar hukum secara pasti, namun bersandar atas pemahaman *ushul fiqih* serta *fiqih*. Karena *ijtihad* siyasi merupakan landasan komunikasi politik Jamaah Persatuan Islam, maka dalam mengungkap *ijtihad siyasi* jamaah Persatuan Islam, peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan Persatuan Islam.

*Ijtihad* merupakan upaya serius yang didasarkan pada kekuatan ilmu serta kesalehan seseorang atau kelompok dalam menentukan keputusan yang akan dilakukan berkaitan dengan masalah-masalah *ubudiyah mahdhab* atau pun masalah-masalah *ubudiyah ghair mahdhab*. Dalam pandangan Islam seseorang atau kelompok yang melakukan *ijtihad* akan mendapatkan pahala. Jika ijtihadnya benar maka dia akan mendapatkan pahala dua sedangkan jika ijtihadnya salah maka dia akan mendapatkan pahala satu". (Wawancara dengan ADR 2 Februari, 2013)

Untuk menjalankan *ijtihad*, di Persatuan Islam didirikanlah Dewan Hisbah yang dimandatkan untuk "memformulasikan" dasar-dasar *aqidah* Persatuan Islam. Setiap ide atau teori yang sudah disepakati oleh Dewan Hisbah ini bisa diterapkan sebagai justifikasi logis atau filosofis bagi program-program dan tujuan-tujuan dari dakwah yang di jalankan oleh jamaah Persatuan Islam.

Tujuan awal dari Dewan Hisbah adalah untuk mengakhiri hegemoni *madzhab* atas umat terutama masalah *khilafiyah*. Pada perkembangan selanjutnya, kosa kata *ijtihad* telah digunakan di forum-forum di luar masalah agama atau *fiqh*, yakni dalam masalah politik. Selama era reformasi, Persatuan Islam sering kali memakai istilah *ijtihad* untuk menjustifikasi sikap politik. Oleh karena itu lahirlah istilah *Ijtihad siyasi*.

Istilah serta penerapan ijtihad yang kemudian di putus oleh dewan Hisbah Persatuan Islam tidak hanya untuk persoalan-persoalan yang berkait erat dengan *fiqih*, terutama *masailul fiqh*, seperti hal-hal yang menyangkut *furuiyah*. Sekarang *ijtihad* juga di gunakan pada persoalan-persoalan politik. Tentunya tidak pada semua aspek politik. Ana menggunakan kata ini pada: bagaimana politik yang di posisikan sebagai media dakwah bisa menghantarkan tujuan-tujuan dakwah. Maka sangat dibutuhkan *ijtihad*. Manakala gerakan dakwah masuk pada wilayah politik, kemudian terjadi pergumulan antara gerakan dakwah disertai dengan politik, maka jadilah *idaratul itihad* antara dakwah dengan politik. Kami jamaah Persatuan Islam menyebut itu semua dengan istilah *ijtihad siyasi* (Wawancara dengan UR, 7 Februari 2012)



Komunikasi politik Persatuan Islam memiliki akar kuat pada landasan *Ijtihad siyasi*-nya yang menjadi sumber inspirasi dan merefleksi pada langkah-langkah praksis jamaah Persatuan Islam dalam komunikasi politik. Sampai sekarang *Ijtihad siyasi* menjadi landasan bidang garapan (bidgar) siyasi Persatuan Islam. *Ijtihad siyasi* Persatuan Islam tidak bersifat dogmatis dan statis, akan tetapi bersifat dinamis kontekstual; pada tataran operasionalisasinya ke dalam tujuan-tujuan dakwah selalu disesuaikan dengan prinsip-prinsip moral dan cita-cita umat.

Salah satu dari tujuan dakwah adalah merubah tatanan dari yang bersifat *dzulumat* menjadi *nur*. Yakni membuat umat tercerahkan. Tentunya bagaimana mungkin tujuan tadi bisa tercapai kalau masih bersikukuh pada pemahaman yang sempit terhadap *mad'u*; seperti tidak melihat siapa yang didakwahi, bagaimana pemahaman orang sekitar kita, menganggap orang lain harus segera mengikuti paham kita, dan lain sebagainya. Dakwah harus sesuai dengan situasi dan kondisi, maksudnya bukan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lalu kita terbawa arus (Wawancara dengan TR, 9 Februari 2012):

Informan RQ (wawancara 16 Februari 2012) mengatakan:

“Di dunia politik *ana* dihadapkan dengan beragam persoalan. Kalaulah *ana* tidak siap dengan semuanya itu ya sudahlah...sebab itu mau tidak mau, suka tidak suka semua harus dihadapi dengan penuh kesabaran, keikhlasan. Sabar dalam arti siap menghadapi semua bujuk rayu politik yang terkadang bisa menggelincirkan *aqidah* kita; tentunya sudah seharusnya kita tidak masuk dalam jebakannya; dan ikhlas menghadapi itu semua sebagai amanah umat yang tidak boleh dikhianati. Misalnya ada uang tiba-tiba yang tidak jelas alang ujunya. Tetapi tentunya bagaimana menyikapi itu semua agar tidak terjadi bentrokan di antara sesama rekan politisi. Di sinilah perlunya kita bijak dalam menyikapi berbagai persoalan. *Ana* perlu mengatur ritme dakwah dalam bingkai politik. Yang *ana* maksud adalah larut tapi tidak terkontaminasi, namun sebaliknya *ana* wajib memberikan *sibghah* dalam pergumulan politik dengan warna islami”.

Oleh karena itu dapatlah dipahami gerak Persatuan Islam dalam komunikasi politiknya memiliki kelenturan terhadap realitas politik empiris. *Ijtihad siyasi* terbuka ruang untuk memberikan tafsir politik selama dalam bingkai *aqidah*-nya. Penterjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik bersifat luwes. Operasionalisasinya harus disepakati secara demokratis dikalangan jamaah.

Menurut pemaparan informan ADR (wawancara 20 Februari 2012):

“*Ijtihad* merupakan salah satu cara dalam mengambil sebuah keputusan yang penting berdasarkan ilmu dan kesalehan seseorang. *Ijtihad* dikalangan

jamaah Persatuan Islam sudah terbiasa dilakukan. Oleh karenanya di kalangan jamaah Persatuan Islam paling anti untuk berbuat *taqlid* buta, karena *taqlid* buta akan menutup rapat pintu *ijtihad*. Misalnya ketika jamaah persatuan Islam menyalurkan aspirasi politiknya. Ana tidak bisa memaksa mereka agar selalu memilih Partai Bulan Bintang sebagai satu-satunya pilihan jamaah. Pun demikian ketika mereka menjadi anggota Dewan mereka berhak untuk melakukan *ijtihad siyasinya*".

Dengan demikian, dalam pandangan *Ijtihad siyasi* Persatuan Islam menjamin kebebasan jamaah Persatuan Islam berpandangan politik; asal tetap dalam batas-batas cita-cita dakwah. artinya *Ijtihad siyasi* Persatuan Islam mengakui hak masing-masing jamaah untuk mempertimbangkan sendiri, berdasarkan suara hatinya bagaimana sebuah prinsip harus diterapkan dalam situasi politik sehingga tidak menuntut ketaatan tanpa reserve terhadap Pemimpin Persatuan Islam. Dengan demikian dapat difahami kalau *Ijtihad siyasi* Persatuan Islam cenderung bersifat rasional, karena itu terbuka ruang untuk diperdebatkan dan tidak dipaksa untuk sepakat. Itulah sebabnya dalam Persatuan Islam tidak tercermin kultus individu terhadap pemimpinnya. Proses kepemimpinan pun dijalankan secara demokratis, mobilitas *jamiyah* dijalankan secara inklusif, dan tidak dapat dipergunakan untuk melegitimasi sebuah kekuasaan.

*Ijtihad siyasi* Persatuan Islam di samping memiliki sisi positif juga mengandung sisi negatif. Diantara sisi positif dari *Ijtihad siyasi* adalah menjamin kebebasan jamaah Persatuan Islam untuk menentukan pilihan politiknya sendiri sebatas dalam kerangka cita-cita ideal Persatuan Islam sejauh tidak keluar dari nilai-nilai *aqidah*-nya yang merefleksi pada kontek dakwah. Pada sisi lain, *Ijtihad siyasi* Persatuan Islam juga membawa sisi negatif terutama ketika posisi langkah membutuhkan mobilitas anggotanya secara maksimal. Misalnya ketika kepentingan politik tertentu yang secara organisasi menjadi pilihan *Jamiyah*, mobilitas anggotanya tidak bisa dikerahkan secara maksimal, maka kepentingan politik itu tidak dicapai. Kader-kader jamaah Persatuan Islam dapat berkiperah di beberapa partai politik, ini menunjukkan kualitas serta *himmah* jamaah yang bisa melebur dalam gerakan politik demi kepentingan dakwah (Wawancara dengan IL, 3 Maret 2012).

Komunikasi politik Persatuan Islam merupakan konstruksi politik yang menuntut langkah-langkah praksis dan implementasi sebagai konsekuensi dari pandangan politiknya sekaligus menjadi pedoman politik jamaah Persatuan Islam. Oleh karena itu komunikasi politik jamaah Persatuan Islam dihadapkan pada; *Aqidah* Persatuan Islam yang mencerminkan langkah dakwah Islam di atas landasan *Ijtihad siyasi*; yang dikembangkan Persatuan Islam inilah kemudian ditransformasikan kedalam corak komunikasi politik jamaah Persatuan Islam; dinamika politik yang merupakan realitas empiris yang memberikan pengaruh

pada relasi kuasa Persatuan Islam dan politik pada setiap momentum politik sehingga membentuk menjadi budaya politik jamaah Persatuan Islam. Komunikasi politik jamaah Persatuan Islam juga tidak dapat dilepaskan dari wacana politik yang dikembangkan oleh Ketua Umum Persatuan Islam sebagai representasi organisasi Persatuan Islam; dimana dia sebagai aktivis partai. Hal ini inheren dalam budaya politik jamaah Persatuan Islam.

Jamaah Persatuan Islam adakalanya merapat dengan kekuasaan politik; namun *Jamiyah* Persatuan Islam tidak menjadi partai politik. Hal ini mencerminkan dinamika langkah jamaah Persatuan Islam dan hal itu dipandang sebagai suatu strategi yang tepat untuk tetap eksis. Memang, Persatuan Islam tidak memiliki afiliasi politik dengan partai politik manapun, juga tidak berpolitik praktis. Meski pun demikian, Persatuan Islam memandang partai politik itu sebagaimana juga kekuasaan negara sangatlah penting dan strategis termasuk untuk menegakkan dakwah Islam melalui tangan negara.

Partai politik, sebagaimana juga kekuasaan negara, sangatlah penting dan strategis termasuk untuk menegakkan dakwah Islam melalui tangan negara. Dakwah bisa tegak salah satunya dengan kekuasaan. Hadis nabi menyatakan *man ra-a munkum munkaran falyughayir biyadih. Ana* sampai saat ini berkeyakinan *yadun* itu adalah kekuasaan. Bagaimana mungkin kita bisa meraih kekuasaan kalo kita berada di luar sistem kekuasaan. Maka *ana* masuk pada sistem kekuasaan itu dan berusaha untuk ber- *jihad* menjalankan amanah Rasul. Langkah *ana* tersebut merupakan *idaratu siyasi* (Wawancara dengan TR, 9 Februari 2012):

Dari uraian tersebut di atas di temukan bahwa antara *jam'iyah* dengan jamaah Persatuan Islam memiliki ikatan emosional yang sangat kental, namun demikian keduanya tetap proporsional; dimana secara kelembagaan Persatuan Islam tidak terlibat secara langsung pada politik praktis; akan tetapi tetap mendorong jamaahnya untuk selalu memperjuangkan dakwah melalui jalur politik. *Idaratu siyasi* merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh jamaah Persatuan Islam. Ketika peneliti menanyakan istilah ini kepada informan, mereka menyebutkannya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan strategi komunikasi politik.

*Idaratu siyasi* merupakan langkah-langkah strategis atau strategi dakwah melalui jalur politik, jadi *idaratu siyasi* adalah upaya menegakkan *Addin*. Tercatat dalam *tariqah tasyri'* Rasul beserta sahabatnya melakukan upaya menegakkan *addin* itu salah satunya dengan cara *idaratu siyasi* yakni melakukan langkah langkah strategis diplomatis. Terutama ketika menyebarkan dakwah Islam ke negara-negara kafir. Rasul pernah mengirim utusan diplomatis ke negara Persia, Beliau menulis surat: *Aslim Taslam Yu'tikallabu Ajrah*. Ini merupakan salah satu langkah diplomatis yang di contohkan baginda Rasul melalui komunikasi politik. Sekarang *ana* melakukan *ijtihad siyasi* melalui diplomasi politik, *ana* melakukan negoisasi, konsolidasi dan pencitraan (Wawancara dengan TR, 9 Februari

2012).

Tercermin dalam rumusan langkah dan perjuangan politik Persatuan Islam yang dihasilkan secara dinamis dari waktu ke waktu bahwasanya komunikasi politik Persatuan Islam tidak dapat dilepaskan dari situasi empiris sosial politik pada saat langkah politik dirumuskan. Dengan demikian, langkah politik jamaah Persatuan Islam bersifat kontekstual. Langkah-langkah politik jamaah Persatuan Islam yang mengandung strategi komunikasi politik Persatuan Islam dapat dilihat pada; strategi komunikasi politik Persatuan Islam yang merefleksi pada strategi komunikasi politik yang saling terkait yaitu: Strategi komunikasi politik dakwah islamiyah, strategi komunikasi politik kekuasaan dan strategi komunikasi politik keumatan.

*Idaratu siyasi* jamaah Persatuan Islam berada pada satu kesatuan yang masing-masing saling mengisi, serta saling melengkapi; yakni *idaratu da'wah*, *idaratu qumwah*, dan *idaratu ummah* (Wawancara dengan ADR, 20 Februari 2012). Dengan demikian, *idaratu siyasi* merupakan manifestasi ijtihad politik Persatuan Islam yang didalamnya terkandung visi, misi, orientasi dan mekanisme komunikasi politik dalam bentuk *idaratu da'wah*, *idaratu qumwah* dan *idaratu ummah*. Secara operasional, konsep *idaratu siyasi* Persatuan Islam mencerminkan landasan pemikiran, pergerakan dan perjuangan jamiyyah Persis dalam kerangka membangun dakwah kebangsaan dan kenegaraan. Dalam perspektif interaksionisme simbolik, *idaratu siyasi* mencerminkan aktivitas politik secara simbolik yang mempengaruhi konsep diri, motif, pemikiran dan kerangka sosial-komunal jamiyyah Persis. Hal ini menjadi rujukan bagi jamiyyah Persis dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis Persis dalam bidang politik. *Idaratu siyasi* di dalamnya termaktub nilai-nilai dan moralitas politik yang menjadi pegangan jamiyyah Persis dalam mengurai berbagai prinsip politik organisasi. *Idaratu Siyasi* menjadi dimensi *soft* yang berpengaruh terhadap nilai-nilai (*values*), keyakinan (*beliefs*), budaya (*culture*), dan norma perilaku (Robbins, 2003: 81).

*Ijtihad siyasi* sebagai akar komunikasi politik persis dirumuskan berdasarkan pada orientasi untuk kemashlahatan ummat. Pada praktiknya, *ijtihad siyasi* ini dikomunikasikan kepada internal dan eksternal Persatuan Islam dengan model dan pola tertentu (*idaratu siyasi*). Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (*mind*) mengenai diri (*self*), dan hubungannya di tengah interaksi sosial, dan tujuan bertujuan akhir untuk memediasi, serta menginterpretasi maka di tengah masyarakat (*society*) di mana individu tersebut menetap (Pramitha, 2020: 65). Keputusan-keputusan politik jamiyyah Persatuan Islam merepresentasikan orientasi, mekanisme dan langkah strategis-taktis baik yang menjadi kebutuhan internal maupun kalangan eksternal Persis. Dimana model komunikasi untuk kalangan internal dilakukan dalam bentuk instruksi baik pada saat rapat internal, konsolidasi maupun melalui penyampaian surat instruksi dari Pimpinan Pusat kepada level di bawahnya dan

kepada bagian otonom Persis. sementara komunikasi eksternal dilakukan dalam bentuk maklumat maupun surat himbauan (Nurhasanah, 2018). Pada titik inilah, *idaratu siyasi* dapat dikatakan sebagai manifestasi ijtihad politik Persis yang menjadi akar dalam merancang strategi komunikasi politik jamiyyah.

### ***Idaratu Da'wah* sebagai Kerangka Pikir Komunikasi Politik Persis**

Strategi komunikasi politik dakwah *islamiyah* merupakan upaya jamaah Persatuan Islam menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui kemasam politik; dimana substansinya bersifat *aqidah* dan *fiqhiyah*. *Aqidah* yang dimaksud oleh jamaah Persatuan Islam adalah keyakinan untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta selalu mengamalkannya sesuai dengan *aqidah* tersebut. Sementara *fiqhiyah* merupakan manifestasi dari keyakinan tersebut yang melahirkan paham keagamaan jamaah Persatuan Islam sehingga membentuk dan merefleksi dalam perilaku keagamaan mereka.

*Langkah* strategi komunikasi politik Persatuan Islam yang berorientasikan pada penguatan aspek *aqidah* dan penguatan kapasitas *fiqhiyah* dapat dilihat pada *Tarbiyatul Muballighin* dalam mempersiapkan para *mubaligh* Persatuan Islam, mengkaji serta menerbitkan *masailul fiqh* di pondok-pondok pesantren Persatuan Islam yang kemudian diterbitkan secara luas; sebagai penguatan aspek *aqidah* dan penguatan kapasitas *fiqhiyah*; melakukan pemurnian ibadah dengan tidak melakukan pekerjaan *bid'ah*, *khurafat* dan *takhayul*.

Merupakan hal yang sangat penting bagi jamaah yang akan mendakwahkan ajaran yang haq untuk mengerti serta memahami apa yang ada dalam ajaran tersebut, firman Allah: *alhaqu min robbika fala atkunanna milnal mumtarin*, disinilah perlunya mengerti dan memahami ajaran yang haq, sehingga tidak ada yang disebut *Dlallu wa adlallu* sesat dan menyesatkan. Jamaah perlu diberi pembekalan secara serius agar tidak menyimpang dari qur'an hadis. Bukan hanya itu, setelah jamaah terjun ke dunia politik wajib pula untuk berdakwah berdasarkan quran hadis. Bila hal itu dilakukan secara simultan oleh jamaah maka cita-cita untuk selalu membawa kebenaran dan merealisasikannya akan terwujud di muka bumi ini (Wawancara dengan DRM, 8 Maret 2012).

Gerak langkah yang dilakukan hendaknya diupayakan tidak menyimpang dari qur'an dan hadis. Apalagi harus masuk ke dalam kenistaan *bid'ah*. Karena *bid'ah* itu sesat. *Kullu bid'atin dlolalah wakullu dlolalatin finnar*. Jadi tidak ada *bid'ah hasanah* sebab di situ *kul lijam'i*. semua itu harus berani dinyatakan, baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan sehari-hari, mengamalkan islam itu harus kemabli dan berdasar pada ajaran yang bersumber dari qur'an sunah bukan dari budaya nenek moyang. Melakukan dakwah itu harus konsisten sesuai dengan keyakinan kebenarannya, namun harus dilakukan semenarik mungkin agar tidak menimbulkan keresahan terutama di antara sesama pemain politik (Wawancara dengan EL, 11 Maret 2012).

Persatuan Islam melakukan pemurnian pemahaman, internalisasi, dan

penerapan hal-hal yang sudah tetap dalam Islam, seperti otoritas Al-qur'an, Al-hadits, ibadah, etika Islam, dan hubungan sosial; juga melakukan modernisasi dalam hal-hal yang tunduk pada perubahan kondisi, seperti sistem organisasi, pengembangan model-model pendidikan dan sebagainya. Persatuan Islam dikenal sebagai yang selalu melakukan langkah purifikasi atas praktek keagamaan yang menyimpang dalam bentuk *takbayul*, *bid'ah*, dan *khurofat*. Reinterpretasi yang lebih luas, tidak hanya menyangkut praktik keagamaan, tetapi juga praktik sosial dan politik, termasuk dalam praktik kehidupan umat menjadikan Persatuan Islam dikenal sebagai organisasi islam “modern” yang mampu melahirkan perubahan-perubahan dan gagasan serta ide-ide kreatif bukan saja dalam ranah pembaharuan pemikiran keagamaan tetapi juga dalam komunikasi politik.

Islam tidak menghendaki umatnya untuk *jumud*. Islam menghendaki umatnya dinamis. Sebab ke-*jumudan* merupakan tanda-tanda kemunduran umat. Padahal konsep islam *ya'lu wala yu'la 'alaih*. Agar cita-cita islam tersebut tercapai maka suatu keharusan umatnya kreatif dalam berbagai hal dengan tetap memegang prinsip-prinsip qur'an hadis. Inilah yang di sebut *tadjud*. Bukan kah Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu mau merubahnya *innallaha la yughayiru ma bi qaumin batta yughayiru ma bi anfusibim*. Saya melakukan inovasi-inovasi dalam gerakan dakwah terutama bagaimana dakwah bisa disampaikan melalui bingkai soial dan politik (Wawancara dengan JN, 12 Februari 2012).

Bertolak dari pembahasan tersebut di atas ditemukan bahwa jamaah Persatuan Islam memasuki ranah politik dalam upaya melaksanakan strategi dakwah. Mereka meyakini dengan cara itulah dakwah bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan Allah dan rasul-Nya. *Idaratu da'wah* yang terkandung dalam *idaratu sijasi* Persatuan Islam dapat dipandang sebagai kerangka pikiran (*mind*) jamiyyah Persis yang dihasilkan melalui proses interaksi Persis baik yang melibatkan individu (pengurus, anggota, simpatisan, jamaah) maupun jamiyyah (organisasi) secara keseluruhan. Orientasi strategi komunikasi politik Persis yang mencerminkan strategi dakwah dalam kerangka membumikan qur'an dan Sunnah tercermin dalam doktrin pemahaman jamiyyah Persis terutama berkaitan dengan aspek aqidah dan fiqhiyyah.

Kerangka pikir ini dihasilkan melalui proses doktrinasi dan internalisasi jamiyyah Persis sebagai sebuah organisasi dakwah. Pada praktiknya, pemahaman keagamaan yang ada dan dikembangkan oleh jamiyyah Persis akan membentuk pola pikir dan tindakan tertentu. Pada titik inilah, ijtihad politik Persis dikembangkan sebagai sebuah bentuk idaratu da'wah dalam rangka membumikan nilai-nilai qur'an dan Sunnah. George Herbert Mead (1863-1931) menyatakan bahwa pikiran (Mind) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain (Girsang,

2014: 10). *Idaratu da'wah* merepresentasikan orientasi dakwah Persis dalam aspek kebangsaan. *Idaratu da'wah* menguatkan kerangka pikir politisi dari jamiyyah Persis agar senantiasa meluruskan niat sebagai ruang dakwah Islam melalui strategi dan konsep kebangsaan yang menjadi visi dakwah jamiyyah. *Idaratu da'wah* merupakan strategi komunikasi dakwah Islam dalam bidang politik.

Komunikasi politik merupakan aktivitas pendistribusian nilai-nilai dan penyampaian simbol-simbol politik. Bentuk hubungan antara komunikasi dan politik tampak pada penyajian makna bagi ide-ide politik, mendefinisikan kedudukan dan fungsi lembaga kekuasaan negara, dan mempromosikan citra kepemimpinan (Halik, 2017: 57). Bagi jamiyyah Persatuan Islam, medan politik dimaknai sebagai ruang dakwah yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam. Negara dipandang sebagai ruang aktualisasi dakwah Islam yang dapat menguatkan dan mendiseminasikan cita-cita Persis dalam syiar Islam. Dalam hal ini, Langkah politik Persatuan Islam dilakukan sebagai kerangka penguatan dakwah Persis dalam ruang-ruang kenegaraan. *Idaratu da'wah* dimaknai sebagai sebuah rujukan dan referensi politik jamiyyah sehingga terwujud kehidupan kebangsaan yang mashlahat.

### ***Idaratu Quwwah* sebagai Konsep Diri Komunikasi Politik Persis**

*Idaratu quwwah* merupakan strategi dakwah yang dilakukan oleh jamaah Persatuan Islam melalui jalur kekuasaan. Mereka meyakini bahwa dakwah harus ditegakkan melalui ranah kekuasaan. Kekuasaan yang sekarang sedang berjalan adalah kekuasaan politik. Oleh sebab itulah jamaah Persatuan Islam memasuki kekuasaan politik dengan harapan tujuan dakwah mereka dapat tercapai.

Politik memiliki makna kekuasaan yang diperoleh melalui kekuatan-kekuatan politik praktis yaitu partai politik. Kekuasaan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan dakwah yang menjadi agenda utama kita. “*Yadullahi fauqo aidihim*” atau “*Man ra-a minkum mun karan falyughayir biyadihi*”. Kita mengenal apa yang pernah dikemukakan oleh para ahli hukum Islam bahwa dakwah sebagai sebuah kewajiban dapat dilaksanakan dengan hati, dengan lisan, dengan pikiran, dengan kekuasaan. Kata dakwah sering digandengkan dengan kata *sabili rabbi* dan juga dengan *hikmah*. *Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah*. Ini berarti bahwa dakwah tidak boleh menyimpang dari jalan Allah yaitu qu'an sunah, juga dakwah mesti di kemas dengan sebijak mungkin. Ana berpendapat kemasan itu harus kuat; sementara untuk saat ini kekuatan kemasan dakwah berada pada ranah kekuasaan politik (Wawancara dengan TR, 9 Februari 2012).

Persoalannya adalah Persatuan Islam telah menetapkan diri sebagai non politik, oleh karena itu strategi komunikasi politik Persatuan Islam tidak secara langsung menempatkan dirinya sebagai kekuatan politik praktis, tetapi dengan membentuk kekuatan politik praktis pada jamaahnya yang menjadi penyalur



aspirasi politik Persatuan Islam. Banyak jamaah Persatuan Islam yang aktif di beberapa partai politik seperti di Partai Bulan Bintang, Paratai Keadilan Sejahtera dan lain sebagainya (Wawancara dengan ADR, 20 Februari 2012).

Beberapa langkah strategi komunikasi politik Persatuan Islam yang berorientasikan pada politik kekuasaan dapat dilihat dengan menempatkan jamaah Persatuan Islam menjadi politisi yang berorientasikan pada politik kekuasaan. Persatuan Islam tidak langsung mencampuri politik dengan cara memperoleh kursi perwakilan. Tetapi jamaah Persatuan Islam menjadi anggota partai politik atau anggota *legislative*.

Informan El (wawancara 11 Maret 2012) memaparkan:

“Saya masuk menjadi anggota DPR karena saya ingin memiliki kekuatan dalam dakwah saya. Saya menyadari betul jika selama ini dakwah tanpa di berengi dengan kekuatan maka dirasa lemah, walau dakwah bukan hanya di lihat dari situ karena dakwah adalah perjuangan bukan hanya hasil. Namun demikian tentunya saya akan memiliki kepuasan tersendiri kalau dakwah yang saya lakukan itu berdampak dalam kehidupan sehari-hari atau dakwah yang saya lakukan itu terlihat hasilnya. Bayangkan kalaulah semua jamaah yang berdakwah memiliki kekuatan, betapa bahagianya kita akan menyaksikan perubahan umat kearah yang sesuai dengan Qur'an hadis”

Jamaah Persatuan Islam ikut membidani pendirian Partai Bulan Bintang. Ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Orde baru ke Orde Reformasi yang salah satunya di prakarsai oleh Yusril Ihza Mahendra dimana pada waktu itu di juluki sebagai Natsir Muda. Jamaah Persatuan Islam mencoba peruntungan politiknya melalui partai Bulan Bintang. Jamaah Persatuan Islam memprakarsai pembentukan wadah politik bagi umat Islam yang belum berpartai terutama bagi jamaahnya. Jamaah Persatuan Islam memandang bahwa institusi politik di luar Persatuan Islam yang menjadi saluran aspirasi dan perjuangan politik Persatuan Islam merupakan suatu keharusan. Pada sisi lain jamaah Persatuan Islam ikut membidani partai politik yang senafas yakni Paratai Keadilan yang kemudian menjadi Paratai Keadilan Sejahtera sebagai sikap jamaah Persatuan Islam menghadapi perkembangan politik dalam masa pergantian rezim dari Orde Baru ke Orde Reformasi.

Persatuan Islam sebagai organisasi memilih alat perjuangan dalam bidang politik dengan menempatkan jamaahnya membentuk satu Partai Politik atau masuk salah satu partai politik di luar organisasi Persatuan Islam; karena menyadari bahwa antara Persatuan Islam dan Partai politik tidak ada hubungan organisatoris tetapi tetap mempunyai hubungan *Ijtihad siyasi*.

Secara pribadi sebagai jamaah Persatuan Islam lebur dalam gerakan politik praktis, namun secara *jamiyah* Persatuan Islam tetap independent tidak terkait langsung atau berafiliasi dengan salah satu partai politik manapun. Hal ini

dimaksudkan agar *jamiyah* mudah melakukan pengontrolan terhadap jamaahnya yang masuk di ranah politik jika terjadi penyimpangan dari *rub jibad*, *rub jibad yang di maksud* yakni untuk memperjuangkan umat dengan berlandaskan Qur'an sunah, melakukan pemurnian ajaran agama dari pengaruh *takebayul*, *bid'ah*, dan *churafat* dan lain sebagainya. Langkah seperti inilah yang selalu dilakukan saya dalam ber-*jibad* melalui jalur kekuasaan politik (Wawancara dengan IL, 3 Maret 2012).

*Idaratu qumwab* dalam konsepsi ijtihad politik Persis dapat dimaknai sebagai penguatan langkah dakwah Persis dalam aspek kebangsaan. *Idaratu qumwab* sebagai salah satu strategi dakwah Persis dimaksudkan sebagai formulasi konsep diri setiap anggota, kader atau simpatisan Persis yang terjun pada bidang politik. Konsep diri terdiri dari kesadaran individu mengenai keterlibatannya yang khusus dalam seperangkat hubungan sosial yang sedang berlangsung. Kesadaran diri merupakan hasil dari suatu proses reflektif yang tidak kelihatan, dan individu itu melihat tindakan-tindakan pribadi atau yang bersifat potensial dari titik pandang orang lain dengan siapa individu ini berhubungan (Rakhmat, 2004: 99-106).

Konsep diri ini berlangsung melalui serangkaian interaksi individu dengan individu lainnya dan dalam ruang sosial kemasyarakatan. Herbert Blumer menyatakan bahwa manusia bertindak atau bersikap terhadap manusia yang lainnya pada dasarnya dilandasi atas pemaknaan yang mereka kenakan kepada pihak lain tersebut (Girsang, 2014: 4). Keberadaan *ijtihad siyasi* Persis yang dilakukan sebagai langkah penguatan *idaratu qumwab* dipandang sebagai sebuah konsep diri yang harus diinternalisasikan oleh setiap jamaah Persis dalam ranah politik kekuasaan. Hal ini menjadi pembeda antara politisi Persis dan non Persis. sehingga, partisipasi politik setiap jamaah Persis baik secara langsung dalam lapangan kenegaraan (dengan menjadi anggota DPR, eksekutif maupun pada ruang strategis kenegaraan lainnya) maupun secara tidak langsung (partisipasi dalam kontestasi politik dengan menjadi pemilih) diorientasikan untuk menciptakan kemashlahatan dan menegakkan kalimat tauhid dalam lapangan dakwah kekuasaan.

Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta - secara langsung atau tak langsung- dalam pembentukan kebijaksanaan umum (Budiarjo, 2010: 367). Keberadaan jamiyyah Persatuan Islam dalam lapangan dakwah kenegaraan dilakukan sebagai upaya penguatan dakwah Islamiyyah. Partisipasi politik jamiyyah Persis dikerangkai oleh konsep diri sebagai pejuang dakwah yang mengisi ruang-ruang strategis negara dengan nilai-nilai keislaman. Pada praktiknya, seluruh elemen jamiyyah dalam lapangan dakwah kekuasaan masing-masing berdiri dan berjalan sendiri-sendiri menurut caranya sendiri-sendiri, tetapi saling pengertian dan menuju tujuan dakwah Islamiyyah. Misalnya, dukungan Persatuan Islam terhadap pencalonan Sidiq Amin sebagai calon anggota DPD pada 2004 dan jamaah lain untuk menjadi anggota *legislative* dipandang sebagai langkah-langkah politik Persatuan Islam yang didalamnya syarat dengan kepentingan dakwah Islam sebagai formulasi *idaratu qumwab* jamiyyah.

### ***Idaratu Ummah* sebagai Kerangka *Society* Komunikasi Politik Persis**

Strategi komunikasi politik keumatan yang dilakukan jamaah Persatuan Islam dalam kehidupan umat menempatkan sebagai kekuatan moral dan kelompok kepentingan dalam dinamika kehidupan. Strategi komunikasi politik jamaah Persatuan Islam berusaha untuk senantiasa membela mempertahankan serta menegakkan keadilan bagi umat. Sementara secara keorganisasian Persatuan Islam menentukan posisi dan sikapnya yang benar-benar netral terhadap politik praktis dan partai politik, yakni tidak memiliki hubungan afiliasi apapun, secara jelas Persatuan Islam menunjukkan kenetralan dengan meletakkan partai apapun termasuk Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Sejahtera berada di luar Persatuan Islam, dengan spirit dakwah islamiyah, dengan makna melakukan fungsi dakwah terhadap kekuatan-kekuatan politik, memberi kebebasan politik kepada jamaahnya dengan menggunakan hak politiknya.

Melakukan gerak langkah dalam bidang politik merupakan bagian dari gerakan pembenahan terhadap umat, dan dilaksanakan berdasar landasan dan peraturan yang berlaku. Dalam hubungan ini, terdapat dua point penting tentang relasi sebagai jamaah Persatuan Islam dan politik, namun sebagai *jamiyah* Persatuan Islam tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik apa pun. Jamaah Persatuan Islam memandang dinamika keumatan tanpa terjebak pada fungsi partai politik dengan memosisikan diri sebagai kekuatan moral dan kepentingan, tidak alergi dan menganggap negatif terhadap politik (Wawancara dengan ADR, 20 Februari 2012)

Secara organisasi Persatuan Islam tidak berurusan dengan partai politik dan dunia politik praktis, maka fungsi itu dapat dijalankan oleh para kadernya dengan ketentuan untuk tetap profesional sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Persatuan Islam dalam menjalankan peran keumatan sebagai kekuatan moral dan kelompok kepentingan yang menjalankan fungsi dakwah islamiyah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai komponen lain untuk mendorong kebijakan yang positif, dan sebaliknya mencegah kebijakan yang salah upaya memberikan pencerahan umat.

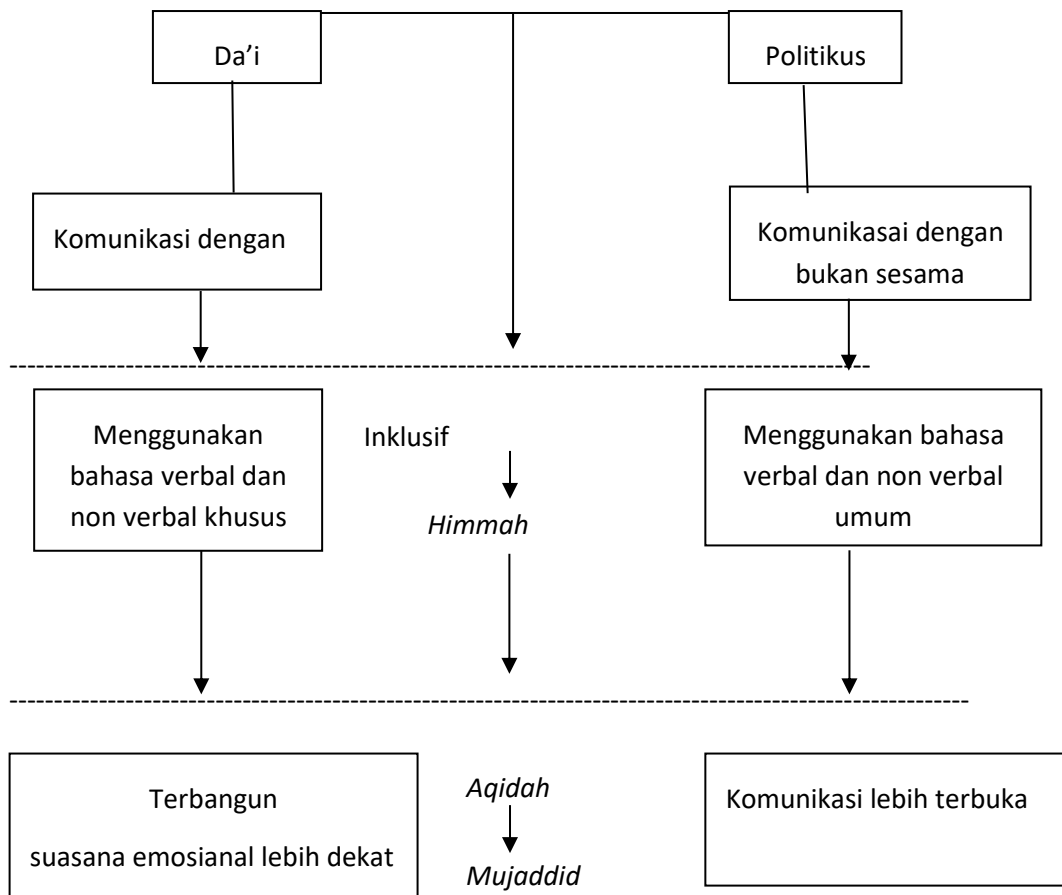
Mengkonstruksi sebuah model tentu harus diawali dengan penelitian ilmiah, karena lewat penelitianlah realitas-realitas tertentu dapat diketahui dan dipahami. Model bukan merupakan fenomena itu sendiri, namun paling tidak dengan membuat sebuah model dari fenomena komunikasi yang di teliti dapat membantu penelusuran terhadap realitas tersebut. Mengkonstruksi sebuah model komunikasi akan mempermudah setiap orang untuk memahami realitas dan fenomena komunikasi yang sangat kompleks dan rumit. Berkaitan dengan hal ini Mulyana (2002:121) mengatakan bahwa, untuk lebih memahami fenomena komunikasi, kita akan menggunakan model-model komunikasi. Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata ataupun abstrak, dengan

menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut.

Realitas dan fenomena komunikasi jamaah Persatuan Islam masih jarang diteliti oleh para ilmuwan komunikasi, sehingga sangat wajar apabila sangat sulit menemukan model komunikasi politik jamaah Persatuan Islam. Penelitian ini dihadirkan di tengah keterbatasan penelitian dan model komunikasi yang merepresentasikan realitas komunikasi jamaah Persatuan Islam. Penelitian ini hanya mengungkap sebagian kecil dari realitas besar dan kompleks. Penelitian ini hanya meneropong realitas komunikasi jamaah Persatuan Islam yang menjadi politikus. Dari hasil peneitian yang telah dilakukan, telah ditemukan beberapa realitas komunikasi yang khas. Hasil penelitian tersebut dikonstruksi oleh peneliti dalam model komunikasi yang bisa dikategorikan masih sederhana dan dangkal ini.

Gambar 2

Konstruksi komunikasi jamaah Persatuan Islam



Penelitian ini menemukan bahwa terjadi perubahan pola komunikasi jamaah Persatuan Islam sesudah menjadi politikus. Perubahan pola komunikasi tersebut antara lain disebabkan oleh adanya perubahan medan dakwah dan suasana parlemen yang lebih dinamis dibandingkan dengan suasana sebelum mereka menjadi politikus.

Sebelum masuk ke ranah politik, jamaah Persatuan Islam cenderung tertutup baik dalam menggunakan simbol-simbol verbal ataupun non verbal. Penelitian ini menemukan pola komunikasi dan konstruksi komunikasi yang berubah setelah jamaah Persatuan Islam masuk di ranah politik. Simbol-simbol verbal yang digunakan saat berkomunikasi dengan bukan jamaah lebih lentur. Bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi lebih diplomatis. Dalam melakukan negoisasi unntuk mencapai tujuan dakwah lebih banyak menggunakan bahasa aplikatif dan komunikasi dengan bukan jamaah lebih terbuka. Sementara dalam konteks komunikasi dengan *ikhwan* ternyata intensitas komunikasi lebih rekat lagi. Ketika berkomunikasi dengan *ikhwan* suasana lebih hangat semakin intens dan solid, pada waktu bersamaan komunikasi dengan bukan *ikhwan* lebih terbuka mengalami proses membumi dengan pendekatan yang lebih cair dan aplikatif sehingga relatif lebih bisa diterima oleh kelompok bukan jamaah.

Posisi sebagai politikus dipahami merupakan sebagai amanah yang harus ditunaikan dengan kejujuran, bersih, penuh tanggung jawab. Peneliti menemukan bahwa seluruh perubahan tersebut beranjak dari pemahaman bahwa dakwah itu harus membumi. Hal ini memicu *himmah* jamaah Persatuan Islam untuk selalau memberikan warna keislaman dalam politik. Dakwah di parlemen menimbulkan benturan-benturan *aqidah*, dan benturan ini justru semakin mengokohkan kesadaran diri jamaah Persatuan Islam untuk terus *berjihad* di kancah politik dan akhirnya melahirkan pribadi-pribadi yang memposisikan diri sebagai agen perubahan atau *mujaddid* di parlemen. Semua perubahan ini sangat dipengaruhi oleh konsep diri baik atau positif yang dimiliki jamaah Persatuan Islam. Sejalan dengan pendapat Cooley (Mulyana, 2002:74) yang mengatakan bahwa konsep diri individu secara signifikan ditentukan oleh apa yang la pikirkan tentang pikiran orang lain mengenai dirinya.

Kesadaran sebagai da'i membawa jamaah Persatuan Islam untuk melakukan perilaku keagamaan dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan segala kewajiban-kewajiban sebagai seorang politikus yang harus menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Berjihad menyusun peraturan-peraturan yang bisa mensejahterakan umat dan berusaha sekuat tenaga untuk jujur. Inilah bentuk kesadaran bahwa posisi politikus sebagai amanah. Komunikasi yang dilakukan dengan menolak segala sesuatu yang akan merugikan umat sekalipun dikucilkan dan dimusuhi oleh kolega politik lainnya, dan berusaha menjadi politikus yang bersih dan jujur. Ini

adalah bentuk komunikasi politik dakwah dalam konteks kesadaran bahwa posisi politikus sebagai da'i harus dapat merubah tatanan kearah yang lebih baik sesuai dengan tuntunan agama. Komunikasi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk respon dan pemaknaan jamaah Persatuan Islam atas pesan-pesan dakwah yang dipahaminya.

Interaksionisme simbolik mempelajari sifat interaksi yang merupakan kegiatan sosial dinamis manusia. Bagi perspektif ini, individu bersifat aktif, reflektif, dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit dan sulit diramalkan (Yuwita, Aminuddin & Setiadi, 2019: 3). Interaksi sosial membentuk kerangka pikir dan konsep diri jamaah Persis yang melibatkan dirinya dalam partisipasi politik. Pemaknaan jamiyyah Persis mengenai ijtihad politik sebagai upaya *idaratu ummah* menunjukkan adanya proses kebutuhan dan tuntutan untuk terlibat dalam peran-peran strategis politik yang berorientasi pada pelaksanaan dakwah *Islamiyyah*. Dalam hal ini, *idaratu ummah* dapat dipandang sebagai sebuah komitmen jamiyyah Persis dalam memetakan formulasi strategis gerakan politik yang berlaku untuk seluruh jamaah Persis. Kerangka sosial dalam *idaratu ummah* diformulasikan untuk memperkuat kesadaran diri dan kerangka pemikiran jamaah sebagai da'i yang berkewajiban menyebarkan risalah Islam dan menegakkan kalimat tauhid dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam hal ini, medan dakwah politik kekuasaan menjadi medan dakwah strategis bagi jamiyyah Persis dalam membangun peradaban yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman.

Pengelolaan kesan yang dilakukan jamaah Persatuan Islam selaku da'i juga politikus berawal dari persoalan mempresentasikan diri dan juga citra dirinya di depan orang lain yang telah memandang atau memposisikan dirinya sebagai da'i juga politikus. Dengan demikian jamaah Persatuan Islam melakukan pengelolaan kesan tidak terlepas dari pemaknaannya atas penilaian orang lain terhadap dirinya yang dia pahami. Diri atau konsep diri dari Mead yang menjadi inti teori interaksi simbolik sebagai payung dan teori dramaturgis-nya Goffman berlaku dalam hal ini, di mana menurut Mead konsep diri merupakan proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain. Menurut Cooley (Mulyana, 2001:74) mengatakan bahwa konsep diri individu secara signifikan ditentukan oleh apa yang ia pikirkan tentang pikiran orang lain mengenai dirinya.

Konsep diri dan pengelolaan kesan sangat kental hubungannya ketika menjelaskan realitas pengelolaan kesan jamaah Persatuan Islam. Pengelolaan kesan jamaah Persatuan Islam lahir manakal jamaah Persatuan Islam memiliki penilaian diri sebagai da'i yang selalu memelihara dirinya untuk tidak melakukan perbuatan menyimpang dan melakukan pemurnian ajaran islam serta terhindar dari trik serta intri politik yang di anggap kotor. Maka pada saat itu pula jamaah Persatuan Islam melakukan pengelolaan kesan dengan cara menampilkan identitas kondisional, dengan cara membangun kesan-kesan tertentu agar orang lain menganggap dirinya sebagai seorang yang memahami betul akan persoalan

politik, dan mengerti akan persoalan umat (Berger dan Luckman, 1990: 235).

Penelitian ini menemukan strategi pengelolaan kesan yang dilakukan oleh jamaah Persatuan Islam untuk membangun citra diri yang baik di mata mitra komunikasinya agar memuluskan perjuangan dakwah mereka. Pengelolaan kesan dengan cara pemanfaatan kondisi seperti berpakaian resmi dengan dasi bahkan memakai jas digunakan untuk menggambarkan bahwa dirinya sebagai orang yang akrab dengan kehidupan politik pada umumnya. Pada saat yang bersamaan menanggalkan kata-kata yang bernuansa bahasa Arab saat berkomunikasi dengan bukan *ikhwan* supaya lebih terkesan komunikatif. Jamaah Persatuan Islam pada suasana seperti ini menghindari kesan sebagai bagian dari jamaah Persatuan Islam yang terkesan tertutup dan kaku, cenderung tekstual dan dogmatis. Jamaah Persatuan Islam seringkali menggunakan tim atau bekerjasama dengan orang lain upaya melakukan pengelolaan kesan. *Ikhwan* dan jamaah merupakan dua komunitas yang biasa menjadi anggota tim pengelolaan kesan. Merujuk kepada fungsi tim yang oleh Goffman (1959:85) disebut sebagai *performance team*, yakni suatu tim yang mendramatisasikan suatu aktivitas, peran-peran tim pengelolaan kesan pun layaknya suatu team drama yang menampilkan lakon-lakon tertentu guna mendapat kesan tertentu di depan khalayak.

Strategi pengelolaan kesan yang dilakukan oleh jamaah Persatuan Islam di atas semuanya dilakukan di depan bukan *ikhwan* yang bukan jamaahnya. Berdasarkan realitas ini maka dapat diformulasikan bahwa jamaah Persatuan Islam melakukan pengelolaan kesan hanya di depan bukan *ikhwan* yakni di luar komunitasnya. Namun jamaah Persatuan Islam tidak malakukan pengelolaan kesan di depan ikhwannya. Realitas ini apabila dikaitkan dengan makna *region* yang dikemukakan oleh Goffman (1959:109), maka dapat dikatakan bahwa di depan komunitas bukan *ikhwan* jamaah Persatuan Islam adalah *front region* dari pengelolaan kesan jamaah Persatuan Islam, sedangkan di depan *ikhwan* jamaah Persatuan Islam dapat di sebut sebagai *back region*. Semua yang dilakukan Jamaah Persatuan Islam tersebut semata-mata dalam rangka dakwah.

## PENUTUP

Komunikasi politik jamaah Persatuan Islam berdasar pada landasan *ijtihad siyasi* sebagai akar komunikasi politik jamaah Persatuan Islam. Dari *ijtihad siyasi* Persatuan Islam tertransformasi dalam strategi komunikasi politik jamaah Persatuan Islam yang bertumpu pada tiga strategi komunikasi politik yaitu: (a) *idaratu da'wah*, (b) *idaratu qunwah*, (c) *idaratu ummah*. Pada tataran praksisnya, komunikasi politik Persatuan Islam memiliki keterikatan dengan pandangan keagamaan seperti: (a) *ijtihad*, (b) *tajdid*, (c) *jihad*, serta basis sosial baik yang berupa keanggotaan Persatuan Islam maupun pengikut.

Pada sisi lain, komunikasi politik Persatuan Islam memperlihatkan suatu komunikasi politik yang fleksibel, dan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor



realitas empirik sosial politik secara kontekstual yang satu sama lain berjalan secara dinamis. Jamaah Perstuan Islam menyebut komunikasi politik seperti itu *damju siyasi*. Penelitian ini berdampak pada upaya menggali dan memetakan konstruksi dan partisipasi politik organisasi Persatuan Islam dalam merencanakan gerakan dakwah jamiyyah yang diusung oleh Persis. selain itu, Implikasi penelitian menunjukkan bagaimana ijtihad siyasi dimaknai sebagai rujukan *fiqhiyyah* dan strategi komunikasi politik dalam kerangka membangun konsep dakwah Persis dalam medan kebangsaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2017). Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik Identitas dan Ijtihad Politik Alternatif, *Jurnal An-nida': Jurnal Pemikiran Islam*, 41(2), 202-212.
- Al mujib, I. H. (2020). Perspektif Islam dalam Komunikasi Politik Kyai (Studi Etnografi Pengasuh Pondok Pesantren Annuriyyah Jember Jawa Timur), *Jurnal Nomosleca*, 6(1), 68-76.
- Azhar, A. A. (2017). Politik Pencitraan dalam Perspektif Komunikasi Islam, *Journal Analytica Islamica*, 6(2).
- Badri. 2008, *Gerakan Moderen dalam Islam*. Bandung: Alsina.
- Berger, P. L., & Luckman, T. (1990). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan* (Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan). Terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1993). *Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Budiarjo, M. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Girsang, L. RM. (2014). Konsep Diri Pemilih Pemula sebagai Partisipan Politik pada Pemilu Legislatif April 2014 (Studi Interaksi Simbolik pada Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Bunda Mulia), *Jurnal Semiotika*, 8(1), 1-23.
- Goffman, E. (1959). *Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Doubleday Anchor.
- Halik, A. (2018). Ekstensi Simbolik Dominasi Praktik Komunikasi Politik (Reposisi Media dan Bingkai Kultural Masyarakat Terhegemoni Kekuasaan), *Jurnal Dakwah Tabligh*, 18(2), 56-73.
- Jaenuri, A. (2002). Ideologi Kaum Reformis. Surabaya: LPAM.
- Koswara, I., & Gemiharto, I. (2017). Dramaturgis Komunikasi Politik Persatuan Islam (PERSIS), Prosiding Magister Ilmu Komunikasi UNPAD.
- Muchtar, K. (2016). Komunikasi Politik dan Pembentukan Citra Partai. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(2), 136-147.  
<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/2127>
- Muchtar, K., & Aliyudin. (2019). Public Relations Politik Partai Keadilan

- Sejahtera dalam Pemilukada Jawa Barat. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 61–78. <https://doi.org/10.15575/cjik.v3i1.5047>
- Muchtar. 1997. *Menuju Ahlu Sunnah Sejati*. Bandung: Cahaya Obor.
- Mufti, M. (1999). *Arah Perjuangan Menuju Pencerahan Persatuan Islam*. Bandung: Bulan Bintang.
- Mulyana, D. (2000). *Komunikasi Politik Politik Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2001). *Nuansa-nuansa Konucnikasi: Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. Cetakan Kedua. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, D. 2000. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Nimmo, D. (2005). *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Cetakan Kedua. Terjemahan Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhasanah, N. (2018). Pesan Komunikasi Politik Persis dalam Pemilu Tahun 2014, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(4).
- Nurussaadah, E. (2018). Nilai Keterbukaan Ideologi Partai Islam dalam Perspektif Komunikasi Politik, *Jurnal ASPIKOM*, 3(5), 975-985.
- Pramitha, D. (2020). Revitalisasi Kepemimpinan Kolektif-Kolegial dalam Membangun Efektifitas Komunikasi Organisasi Pesantren (Studi Interaksionisme Simbolik di Pondok Pesantren Jombang), *EVALUASI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 45-69.
- Rakhmat, Jalaluddin, 2004. *Psikologi Komunikasi. Edisi Revisi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Rasyid, A. (2011). Konseptualisasi Etika dalam Politik: Perspektif Komunikasi Islami, *Jurnal Ilmu Dakwah*, 5(2).
- Robbins, S. P. (2003). *Organizational Behavior*. Mexico: Pentice Hall.
- Rosyidin, I. (2015). Islam dan Dinamika Politik Indonesia Kontemporer Perspektif Komunikasi Politik, *Jurnal Dialog*, 38(2).
- Sofyan. 1996. *Memahami Pembabruan Gerakan dalam Ormas Islam*. Bandung: Karya Ilmu.
- Yuwita, N., Aminuddin, A., & Setiadi, G. (2019). Netralitas Kiai di Tahun Politik dalam Perspektif *Symbolic Interaction Theory*, *Jurnal Dakwah Risalah*, 30(2), 1-14.